

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MASSOMBO*'  
PADA PROSESI AKAD NIKAH DI KECAMATAN  
MASALLE KABUPATEN ENREKANG**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

IRMAYANTI

NIM: 10100113010

Pembimbing I: Prof. Dr. Darrusalam, M.Ag.

Pembimbing II: Dr. H. Supardin, M.H.I.

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Maret 2017

Penyusun,



Irmayanti

10100113010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MASSOMBO*’ PADA PROSESI AKAD NIKAH DI KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG”, yang disusun oleh Irmayanti, NIM: 10100113010, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 Maret 2017 M  
28 Jumadil Akhir 1438 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Patimah, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. M. Jamal Jamil, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ  
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Tiada kata yang indah dan patut penulis ucapkan kecuali Alhamdulillah dan syukur kepada Ilahi Rabbi Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dia yang selalu senantiasa melimpah rahmat dan hidayah-nya berupa nikmat dan kesehatan, kekuatan dan kemampuan senantiasa tercurah pada diri penulis sehingga usaha untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Massombo*’ pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”. Begitu pula salawat dan taslim kepada Rasulullah saw, serta para keluarganya dan sahabat yang sama-sama berjuang untuk kejayaan Islam semata.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Sejak awal penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Namun berkat rahmat dan ridho Allah swt., semua permasalahan biasa dilalui oleh penulis. Oleh karena itu, penulis patut bersujud dan bersyukur selalu



kepadanya-Nya. Penulis juga mengucapkan terimah kasih yang Teristimewa dari hati yang paling dalam ucapan terimah kasihku untuk Almarhum Ayahanda Jamma dan Ibunda Tianna, dengan segala rasa hormatku atas segala jerih payah, perhatian, pengorbanan, kasih sayang yang tak henti-hentinya serta doa yang senantiasa diberikan selama penulis melaksanakan perkuliahan hingga penulis dapat melakukan kegiatan belajar sampai penyusunan skripsi hingga selesai. Dan semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari, M.SI, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Darrusalam, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan juga sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Supardin, M.H.I., selaku Ketua jurusan Peradilan dan sekaligus pembimbing II yang telah membina dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Hj. Patimah. M. Ag., selaku sekertaris Jurusan Perdilan Agama yang telah membina dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini

6. Bapak Muhammad Hidjaqz Gaffar, SSTP, M.Si selaku Kepala Kantor Camat Masalle Kabupaten Enrekang beserta stafnya yang telah menerima dan membantu penulis selama melakukan penelitian.
7. Terkhusus pada keluarga besar yang selama ini telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis terutama keempat saudara-saudari penulis, Nursan, Nursanti, Satriana, dan Satriani terima kasih atas dorongan dan motivasi yang diberikan.
8. Kepada teman-teman seperjuanganku seluruh angkatan 2013 yang tak biasa disebut satu persatu terima kasih atas kerja sama dan kekompakan yang diberikan selama menjalani perkuliahan.
9. Kepada sahabat-sahabatku Nurul Mu'minati idris, Hasnaeba, Jumardi, Dwiyanti dan teman-teman kelas PA.A, Kakanda Jasman. S.Hi. , Sayful dan seluruh anggota HPMM Cab. Masalle
10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat penulis sebut namanya satu persatu semoga bantuan yang mereka berikan menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan. Olehnya itu, penulis berlapang dada untuk menerima kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Makassar, 19 Maret 2017



Irmayanti

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. <i>Latar Belakang Masalah</i> .....	1
B. <i>Rumusan Masalah</i> .....	8
C. <i>Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus</i> .....	9
D. <i>Kajian Pustaka</i> .....	11
E. <i>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i> .....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN TEORITIS .....	15
A. <i>Hukum Islam</i> .....	15
B. <i>Pengertian Adat, Hukum Adat dan Dasar Hukum Adat</i> .....	16
C. <i>Sejarah Adat</i> .....	18
D. <i>Manfaat Adat</i> .....	23
E. <i>Massombo'</i> .....	25
BAB III .....	27
METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. <i>Lokasi dan Jenis Penelitian</i> .....	27
B. <i>Pendekatan Penelitian</i> .....	27
C. <i>Sumber Data</i> .....	28
D. <i>Metode Pengumpulan Data</i> .....	29
E. <i>Metode Analisis Data</i> .....	30
F. <i>Metode Pengelolaan dan Analisis Data</i> .....	30
BAB IV .....	32

HASIL PENELITIAN.....	32
A. <i>Gambaran Umum Lokasi Penelitian</i> .....	32
B. <i>Proses adat sebelum prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang</i> .....	36
C. <i>Proses adat sementara prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang</i> .....	38
D. <i>Proses adat Massombo' sesudah prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang</i> .....	42
E. <i>Pandangan hukum Islam terhadap adat Massombo' pada prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang</i> .....	42
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. <i>Kesimpulan</i> .....	59
B. <i>Implikasi penelitian</i> .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostop
ي	Ya	y	ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	a	a
	<i>Kasrah</i>	i	i
	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i



	fathah dan wau	au	a dan u
--	----------------	----	---------

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

### 4. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* , dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ﻯ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(*ﻯ*), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(*ī*)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamza

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf a dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

**Nama : Irmayanti**

**NIM : 10100113010**

**Judul : Pandangan Hukum Islam terhadap Adat *Massombo*’ pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.**

---

Skripsi ini membahas tentang bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Adat *Massombo*’ pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, tidak dapat dipastikan bahwa prosesi perkawinan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan Budaya atau Adat masing-masing yang berlaku seluruh desa pada umumnya dan di daerah Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, dimana prosesi perkawinan adat perlu diketahui dari segi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah proses adat sebelum prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, Bagaimanakah proses adat sementara prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, Bagaimanakah proses adat *Massombo*’ setelah prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dan Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap adat *Massombo*’ pada prosesi akad nikah di kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai adat perkawinan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif, mendeskripsikan status fenomena dengan ungkapan kata-kata atau kalimat, kemudian dilakukan kategorisasi yang berindeksi pada kesimpulan. Adapun media pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: wawancara sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahapan hingga menghasilkan data yang akurat, yaitu: *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding*.

Namun setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa proses Adat perkawinan Kecamatan Masalle sedikit cenderung bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu kepercayaan masyarakat tentang adat *Massombo*’ tetapi bukan berarti perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut Hukum Islam hanya saja masyarakat kecamatan Masalle salah memaknai beberapa simbol dalam perkawinan tersebut.

Implikasi penelitian dalam skripsi ini adalah melakukan pendekatan persuasive, yaitu melakukan pendekatan secara door to door dengan perlahan kepada masyarakat setempat terutama kepala adat dan petinggi adat, melakukan pendekatan kepada golongan muda maupun anak-anak untuk menjelaskan makna adat *Massombo*’ agar tidak salah memahami. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kecamatan Masalle melalui penyuluhan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Perkawinan merupakan suatu perintah syara' yang telah di anjurkan oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ar-Rum/30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup>

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407

yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)<sup>2</sup>, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>3</sup>

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>4</sup> Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan telah mereka lakukan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan tetapi ada pula pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019).

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978) h. 9

<sup>4</sup>Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris* ( Bandung: PT. Intermedia, 2002) h. 1.



Hal tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah lanjut usia dan bisa dikenal dengan istilah *In Extremis*. Adanya akibat hukum dalam berhubungan hidup bersama pada suatu perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan tentang perkawinan ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama ini dalam suatu undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan.

penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:<sup>5</sup>

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCI.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. (Selanjutnya disebut KUHPerdata).

---

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandur Maju, 2007) h. 5.

5. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara Adat dan Agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.<sup>6</sup>

Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup> Disamping hal tersebut, pada saat itu dikenal pula yang namanya “perkawinan campuran” yaitu perkawinan campuran antar golongan, perkawinan campuran antar tempat dan perkawinan campuran antar agama.<sup>8</sup> Saat ini yang dimaksud perkawinan campuran hanyalah untuk perkawinan internasional.

Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara

---

<sup>6</sup>Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1988 ) h. 55.

<sup>7</sup>Hilman Hadikusuma, *loc.cit.*

<sup>8</sup>Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran* (Bandung: Alumni, 1973) h. 3.

harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.<sup>9</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Hal ini berakibat banyak orang tidak melakukan pencatatan pada kantor catatan sipil.

Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan.

---

<sup>9</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) h. 3.

*Scholten* menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.<sup>10</sup> Menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>11</sup>

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.<sup>12</sup> Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan telah secara jelas menyatakan tentang syarat sahnya suatu perkawinan.

Dalam prakteknya di masyarakat ada pula orang yang hanya melakukan perkawinan dengan cara keagamaannya saja dan tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil. Disamping itu ada pula yang hanya mencatatkan perkawinannya tanpa melakukan upacara agama mereka. Tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas atau prinsip-prinsip dari UU Perkawinan yakni :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>10</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 2000) h. 8

<sup>12</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*. h. 10

- c. Perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan.
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami-istri harus bersatu antara jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan
- h. Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang

Penjelasan mengenai arti perkawinan sesuai agama dan kepercayaan yang mana semuanya bertujuan sama yaitu untuk menjadi keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan. Mengenai tatacara untuk melangsungkan perkawinannya, hal ini dijelaskan oleh Mary Welstead, sebagai berikut:

(Upacara keagamaan: "Dimana setiap keinginan untuk melakukan pesta perkawinan atau upacara perkawinan (keagamaan), setiap aturan yang digunakan berbeda-beda dalam setiap golongan, karena masing-masing pasangan tidak sama dalam memeluk agama dan kepercayaannya, hal ini menyatakan bahwa setiap golongan agama memiliki peraturan masing-masing dalam hal untuk memberikan izin melaksanakan Upacara Keagamaannya (perkawinan)".<sup>13</sup>

Masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmani tetapi juga unsur rohani yang mempunyai

---

<sup>13</sup>Mary Welstead, dkk, *Family Law* (New York: oxford University Press, 2006 ) h. 15.

peranan penting. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan “Tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan”.<sup>14</sup>

Paparan diatas memberikam inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Pandangan masyarakat islam tentang adat *massombo*’ dalam pernikahan di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Mengingat nikah perkawinan tidak hanya terbatas pada wilaya agama semata, pertimbangan sosial masyarakat juga cukup memiliki pengaruh pada sebuah pernikahan. Atas pertimbangan sosial tersebut, maka peneliti hendak mengetahui persepsi atau tanggapan masyarakat islam setempat terkait adat *massombo*’.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, agar penelitian ini lebih terfokus maka yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Adat *Massombo*’ pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, berdasarkan pokok masalah tersebut dapat ditarik sub masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses adat sebelum prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimanakah proses adat sementara prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?

---

<sup>14</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung, Mandar Maju, 2007) h. 7.



3. Bagaimanakah proses adat *Massombo* setelah proses akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?
4. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap adat *Massombo* pada prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

#### **1. Fokus Penelitian.**

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang melalui wawancara langsung kepada tokoh yang paling berpengaruh di masyarakat tersebut tentang penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.

#### **2. Deskripsi fokus**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahan pemahaman maka peneliti memberikan definisi mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Massombo* pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”.

##### **a. Hukum Islam**

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan, norma atau kaedah yang bersumber dari agama Islam, Baik yang berkaitan dengan

ibadah maupun bidang muamalah. Berkaitan mengenai ibadah yakni dan tata cara manusia berhubungan dengan tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi dan tidak boleh diubah-ubah. Ketentuannya telah diatur oleh Allah swt sendiri dan dijelaskan secara rinci oleh Rasul-Nya. Sedangkan dalam muamalah dalam pengertian yang luas yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi kalau pun ada, tidak pula terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah.

b. Adat

Adat adalah aturan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

c. Adat *Massombo*’

Adat *Massombo*’ sebelum perkawinan (kawin *To Jolo*) adat ini dilakukan oleh orang dulu sebelum melakukan pernikahan yang sebenarnya dan masi sangat kental dilakukan sampai sekarang di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Adat kawin *To Jolo* Ini dilakukan pas hari lamaran.

Adat *Massombo*’ sementara perkawinan (*Kengge Kalepe*) adat ini dilakukan apabila calon pengantin Pria dan wanita masi mempunyai hubungan keluarga. dan apabila calon pengantin pria dan wanita tidak berhubungan keluarga adat ini tidak dilakukan.

Sementara perkawinan menabur beras ini dilakukan saat pengantin pria datang dirumah laki-laki dan perwalian pernikahan (*Massorong Wai*) adalah

penyerahan perwalian kepada Orang lain dengan menggunakan secangkir air jernih yang belum dimasak.

Adat *Massombo* yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setelah tiga hari sesudah prosesi akad nikah. Adat *Massombo* ini masi sangat kental dilakukan oleh masyarakat setempat di kecamatan masalle.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian mengenai “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Massombo*’ Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang” peneliti menemukan buku yang berkaitan dan menjadi pedoman dalam penilitian ini, diantaranya :

1. Hukum Islam oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. buku ini membahas tentang Islamn, hukum Islam, sumber asas-asas hukum Islam, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, dan hukum Islam Indonesia. Kelebihan dari buku ini adalah buku yang sangat terperinci tentang hukum Islam, baik sumber , asas maupun sejarah dan perkembangannya terutama di Indonesia, tapi keterbatasan dari buku ini adalah kurangnya pembahasan mengenai hukum Islam contohnya tidak membahas mengenai hukum adat padahal hukum Islam yang berkembang di Indonesia ada yang sejalan dan da juga yang bertentangan dengan hukum adat, sementara penduduk Indonesia yang mayoritas berpendudukan Islam namun masih memegang teguh hukum adat yang turun temurun.

2. Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia) oleh Ilham Basri, SH. M.Pd tentang sistem norma, hukum Indonesia sebagai sistem norma yang berlaku Indonesia, sumber hukum Indonesia, system hukum di Indonesia yang didalamnya di bahas mengenai hukum kepidanaan, hukum perdata, hukum tata Negara, hukum Internasional, hukum Agraria, hukum adat dan terakhir adalah hukum, perubahan, dan penegakannya. Kelebihan buku ini adalah pembahasan yang cukup luas tentang hukum yang ada di Indonesia bahkan juga membahas tentang hukum Internasional tapi terbatas pada hukum di Indonesia saja, tapi tidak membahas hukum Islam yang menjurus ke keperdataan yang notabenehnya berlaku di Indonesia di lingkup pengadilan Agama, buku ini hanya membahas keperdataan dalam lingkup pengadilan Negeri.

3. Fiqh Munakahat oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Buku ini membahas tentang seluk beluk pernikahan dalam Islam, Peminangan, syarat dan rukun nikah, mahar dan Kafa'ah (persamaan) dalam pernikahan Islam, keharaman terjadinya pernikahan, batalnya pernikahan, hak dan kewajiban suami Istri, Perwalian, perceraian (Talak) dan akibatnya, serta, Masalah iddah dan rujuk serta dalil-dalil dan ijtihad para fuqaha' (ahli fiqh). Karena untuk membahas lebih lanjut penelitian ini terlebih dahulu perludipahami perkawinan dalam Islam khususnya mengenai prosesi pelaksanaanya. Kelebihan dari buku ini yang kemudian penulis mengambil sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah pembahasan yang lebih tentang hukum Islam Khususnya di bidang perkawinan dan rincian dari pernikahan sangat mudah untuk dipahami, namun terbatas pada pembahasan

yang lebih luas mengenai pernikahan Adat, buku ini tidak banyak menjelaskan pernikahan diluar dari pernikahanyang ditetapkan oleh hukum Islam dan bagaimana kemudian penerapan dari hukum Islam tersebut.

4. Hukum perdata Islam di Indonesia Studi Kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI oleh Dr. H. Amiur Naruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag. Buku ini membahas tentang perkembangan dan pergeseran konseptual hukum Islam, selain ini juga menyajikan sebuah studi serius tentang tema inti hukum perdata yaitu perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, membatalkan perkawinan hingga hak dan kewajiban suami istri yang dikemas dalam analisis kritis dan komperatif terhadap fikih, UU No. 1/1974 hingga kompilasi hukum Islam Indonesia.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan**

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin di capai dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah:

- a) Untuk mengetahui proses adat sebelum prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang
- b) Untuk mengetahui proses adat sementara prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang
- c) Untuk mengetahui proses adat *Massombo* ' setelah prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

- d) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adat *Massombo'* pada prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

## 2. Kegunaan

### 1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan pencerahan dan juga sebagai bahan wacana bagi masyarakat luas yang berada di setiap daerah dan khususnya pada daerah tempat penelitian agar mengetahui manfaat dari adat *Massombo'* dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang agama.

### 2. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap agar penulisan ini dapat memberikan informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat luas terkait dengan masalah adat *Massombo'*.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Hukum Islam*

##### 1. Definisi hukum Islam

Hukum berasal dari bahasa Arab *الحكم* (*al-hakam*). Artinya norma atau kaidah yakni tolak ukur, patokan, pedoman, yakni dipergunakan untuk nilai tingka laku atau perbuatan manusia atau benda. Sedangkan Islam adalah sebuah ideology dan keyakinan yang didalamnya telah diataur oleh Allah swt. Sebuah tata cara dalam menghubungkan manusia dengan-Nya dan manusia dengan manusia lainnya. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama islam dan menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri. Atau dengan kata hukum Islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat yang bersumber dari Allah swt. Melalui ajaran agama islam namun ketika dilanggar maka sangsi sudah menjadi ketentuan-Nya sebagai balasan.<sup>15</sup>

##### 2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Jika kita bandingkan hukum islam dengan muamalah ini dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum pubik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak

---

<sup>15</sup> Prof. H. Muhammad Daud Ali, S.H. Hukum Islam, pengantar ilmu hukum dan tatahukum islam di Indonesia ( Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada, 2012), h. 43

membedakan antara hukum perdata dengan hukum public. Ini disebabkan karena menurut system.

Itulah sebabnya dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya *خلفة, خنية, مغملو, منقحة* dan *مخسمة*.

### **B. Pengertian Adat, Hukum Adat dan Dasar Hukum Adat**

Apabila hendak dibicarakan gejala hukum dengan segala aspeknya, maka mau tidak mau harus juga disinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah dari hukum tersebut. Hukum adalah masyarakat juga, yang ditelaah dari suatu sudut tertentu, sebagaimana juga halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut mungkin agak berbeda dengan apa yang lazim dilakukan di Indonesia dengan mengikuti tradisi Eropa Kontinental. Tradisi tersebut tertitik tolak pada pendirian, bahwa hukum merupakan suatu gejala yang berdiri dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti, bahwa hukum secara tegas terpisah dari masyarakat maksudnya adalah bahwa hukum hendak dipelajari sebagai suatu gejala yang telah “dibersihkan” dari faktor-faktor lain.

#### **1. Pengertian Adat**

Kata “adat” sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa Sansekerta “a” (berarti “bukan”) dan “dato” (yang artinya “sifat kebendaan”. Dengan

demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.<sup>16</sup>

## 2. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan dari Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka.

Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “Adat” dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “Hukum Adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Rajawali, 1990), h. 83.

<sup>17</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Cet. V; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h.1.

Menurut “*Prof. Dr. Supomo S.H*” dalam karangan beliau “Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat” memberikan pengertian bahwa :

“Hukum adat merupakan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.<sup>18</sup>

Pendapat lain menurut “*Prof. M.M. Djodigono S.H*” dalam buku “*Asas-Asas Hukum Adat*” hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.<sup>19</sup>

Beberapa pengertian di atas yang telah diberikan oleh para sarjana tersebut, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah sebagai suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

### **C. Sejarah Adat**

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga

---

<sup>18</sup>Supomo, *Bab-bab Tentang Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 14.

<sup>19</sup>Djodigono, *Asas-Asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Yayasan Bandung Penerbit Gama, 1958), h. 78.

sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di tanah air. Saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Jenis hukum tertua yang pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat dan diakui oleh negara.

#### 1. Masa Hindia Belanda

Berawal dari zaman penjajahan, hukum adat sangat kental di dalam diri tiap pribumi karena belum terbiasa dengan hukum barat yang telah ditetapkan oleh Belanda, maka dibuatlah sistem hukum pluralisme atau *Indische Staatsregeling* (IS) agar penduduk golongan Eropa, Timur asing, dan pribumi dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing.

Dalam *Indische Staatsregeling*, salah satu dasar hukum yang menjelaskan berlakunya hukum adat terdapat pada Pasal 131 ayat (2) huruf a menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan Eropa, bahwa untuk hukum perdata materiil bagi golongan Eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang Eropa pada dasarnya hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda akan dipakai sebagai pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa, dan juga pada Pasal 131 ayat (2) huruf b yang menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia asli atau pribumi dan golongan Timur asing, yang pada intinya menjelaskan bagi golongan pribumi dan Timur asing berlaku hukum adat masing-masing dengan kemungkinan penyimpangan dalam hal:

- a) Kebutuhan masyarakat menghendakinya, maka akan ditundukkan pada perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Eropa.
- b) Kebutuhan masyarakat menghendaki atau berdasarkan kepentingan umum, maka pembentuk ordonansi dapat mengadakan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia dan Timur asing atau bagian-bagian tersendiri dari golongan itu, yang bukan hukum adat bukan pula hukum Eropa melainkan hukum yang diciptakan oleh Pembentuk UU sendiri.

Jadi pada intinya, di masa Hindia Belanda terdapat delegasi kewenangan atau perintah untuk mengkodifikasikan hukum bagi pribumi dan Timur asing.

## 2. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang juga terdapat regulasi yang mengatur tentang hukum adat di Indonesia, yaitu pada Pasal 3 UU No.1 Tahun 1942 yang menjelaskan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaanya, hukum dan UU dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer.

Arti dari Pasal tersebut adalah hukum adat yang diatur pada saat masa penjajahan Jepang sama ketika pada masa Hindia Belanda, tetapi harus sesuai dengan peraturan militer Jepang dan tidak boleh bertentangan. Pada hakikatnya, dasar yuridis berlakunya hukum adat pada masa penjajahan Jepang hanya merupakan ketentuan peralihan karena masanya yang pendek.

## 3. Masa Pasca Kemerdekaan

Dasar hukum berlakunya dan diakuinya hukum adat di Indonesia juga diatur setelah Indonesia merdeka. Contohnya pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini” menjelaskan bahwa dalam pembentukan regulasi peraturan mengenai hukum adat yang lebih jelas, maka dasar hukum sebelumnya yang tetap digunakan untuk perihal berlakunya hukum adat.

Pada Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 pun juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

#### 4. Era Reformasi

Di zaman modern, Setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pasal tersebut telah membuktikan bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada, dan diakui oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, dalam beberapa Undang-Undang juga mengatur keberlakuan hukum adat. Contoh dalam Undang-Undang Pokok Agraria, lebih tepatnya pada Pasal 5 yang berbunyi “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”<sup>20</sup> Dasar yuridis tersebutlah yang dapat menjelaskan berlakunya hukum adat secara sah di Indonesia.

Hukum adat adalah hukum yang harus diperjuangkan karena ia merupakan hukum tertua yang telah dimiliki Indonesia dan juga karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya dengan keanekaragaman budaya, suku, dan ras, dan dengan hukum adat, maka segala kepentingan masyarakat adat dapat diayomi olehnya, untuk Indonesia yang lebih baik.

Adapun ayat yang membahas tentang adat istiadat di dalam Q.S Al-A'raf/7:

199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw agar menyuruh ummatnya yang ma'ruf. Maksud dari 'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik.

---

<sup>20</sup>Bernhard limbong, *Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 158



#### **D. *Manfaat Adat***

##### **A. Hukum Adat sebagai Ilmu Pengetahuan**

Ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Di dalam meningkatkan hidup itu dibutuhkan petunjuk-petunjuk hidup. Salah satu petunjuk hidup itu adalah norma hukum, termasuk norma hukum adat.

Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan pada umumnya, maka hukum adat mempunyai:

- a) Obyek adalah sasaran yang harus dipelajari yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berkonsekuensi hukum.
- b) Metode adalah cara untuk mempelajari, meneliti dan menganalisis hukum adat.
- c) Sistematis adalah disusun sedemikian rupa sehingga orang mudah untuk mempelajarinya

Dengan demikian hukum adat dipelajari untuk memenuhi tugas Pengajaran dan Penelitian.

##### **B. Dalam rangka pembinaan atau pembentukan hukum Nasional**

Pembentukan hukum nasional menuju unifikasi hukum tidak bisa mengabaikan hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat merupakan sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan, karena hukum adat mempunyai asas-asas atau nilai-nilai yang universal dan lembaga. Asas-asas hukum adat yang dapat dipakai sebagai bahan pembentukan hukum nasional adalah :

- a) Asas kebersamaan dan kekeluargaan

Artinya mengutamakan kepentingan bersama dan kekeluargaan dalam pembentukan berbagai perundang-undangan.

b) Asas gotong royong.

Asas ini dapat berbentuk gotong royong secara organis/konvensional, yaitu spontanitas saling membantu menolong yang membutuhkan. Dan juga ada yang gotong royong secara organisatoris, yaitu, tolong menolong melalui organisasi tertentu.

c) Asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat

Manusia dikatakan berguna apabila dapat membantu sesamanya. Demikian pula hak milik bukan berarti milik pribadi semata-mata namun juga untuk kepentingan umum.

d) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.

Kekuasaan dari mulai desa hingga pemerintah pusat dibentuk dari persetujuan warga, baik dengan pemilu langsung maupun pemilu tidak langsung.

C. Mengembalikan dan Memupuk Kepribadian Bangsa

Kepribadian atau karakter bangsa Indonesia yang cinta dengan kebudayaannya semakin luntur oleh modernisasi dan westernisasi. Dengan mempelajari hukum adat yang mengandung nilai-nilai luhur, diharapkan rasa nasionalisme/kepribadian bangsa menjadi tumbuh-kembang kembali.

D. Agar mengetahui Fungsi dari Hukum Adat

Hukum adat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedoman dan pengawasan (*sociual control*). Sebagai pedoman, maka hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, bertindak, berbuat di dalam masyarakat. Sedangkan sebagai pengawasan, hukum adat melalui petugas-petugas adat akan mengawasi segala tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan hukum adat. Apabila ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi untuk memulihkan keseimbangan.

#### **E. *Massombo*'**

*Massombo*' yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang setelah prosesi akad nikah. Pihak wanita berkunjung ke rumah laki-laki setelah tiga hari sesudah menikah dan harus hari ketiga tidak boleh kurang atau lebih.

Di adat bugis juga dikenal dengan *Mapparola*. Upacara ini dapat dilaksanakan sesudah hari pernikahan. Pihak wanita mengadakan kunjungan balasan ke rumah pengantin laki-laki. Pada hari *mapparola*, pihak pengantin laki-laki datang menjemput rombongan pengantin wanita sejam sebelumnya. Setelah penjemput pulang kerumah pengantin wanita, rombongan pengantin wanita berangkat. Rombongan tersebut terdiri atas:

1. Rombongan pengantin terdiri atas bali botting dan passeppi.
2. Rombongan pettiwi-tiwi.
3. Indo susu ( inang pengasug ).
4. Seorang remaja yang berpakaian wanita sebagai (pallalengeng).
5. Sejumlah wanita dan laki-laki yang berpakaian adat lengkap.

6. Rombongan pembawa bosara dua akkerang, yang berisi kue adat.<sup>21</sup>

Setelah pengantin tiba, sekelompok *paduppa botting* berpakaian adat, menjemput pengantin wanita dengan membawa cincin dan surat yang berisi hibah berupa sawah atau kerbau. Selanjutnya, pengantin dituntut untuk mengadakan upacara *mallalawo*, khusus untuk bangsawan. Pengantin wanita menginjak kepala kerbau sambil mencuci kaki, lalu dituntut menuju ke pelaminan.<sup>22</sup>

Tiga hari kemudian, sesuai dengan kesepakatan pihak mempelai laki-laki, dilaksanakan *mapparola* yang kedua. Pengantin wanita beserta pengantarnya, dengan berpakaian biasa, mengunjungi rumah mertuanya untuk kedua kalinya pada kesempatan ini, pengantin dan pengantarnya bermalam semalam. Pada waktu subuh, keesokan harinya, kembali ke rumah mereka. Sebelum meninggalkan rumah mertuanya, pengantin dan rombongannya diberi sarapan pagi berupa, songkolo dan ketan, dengan lauk pauk sekedarnya sesuai dengan kesanggupan. Mertua pengantin wanita pada kesempatan ini memberikan hadiah kepada menantunya, terutama pada golongan bangsawan, yang dapat berupa ternak, tanah, dan atau perhiasan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Nonci, upacara adat istiadat masyarakat bugis (Makassar : aksara,2002), h. 36

<sup>22</sup>Nonci, upacara adat istiadat masyarakat bugis. h. 36

<sup>23</sup>Andi nurnaga, adat istiadat pernikahan masyarakat bugis (Makassar : mandiri jaya, 2001), h. 57

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Lokasi dan Jenis Penelitian***

###### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kabupaten Enrekang Kecamatan Masalle dengan objek penelitian masyarakat, untuk memperoleh informasi dan data mengenai pelaksanaan adat perkawinan yang terdapat di Kecamatan Masalle faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh adat bagi masyarakat dan mendapatkan informasi penting mengenai pelaksanaan adat di kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

###### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian sosiologis atau empiris karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat yang ada di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Selain itu, peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sangat sesuai dengan judul yang diangkat yang bertujuan mengamati fenomena di suatu masyarakat.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Terkait dengan jenis pendekatan penelitian, dalam kesempatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam *variable* atau hipotesis.

Berdasarkan pemaparan data maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau menangani bidang tertentu. Data yang diperoleh tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti.

### **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **a. Sumber Primer**

Sumber Primer yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Msalle Kabupaten Enrekang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

#### **b. Sumber Sekunder**

Sumber Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh munakahat, hukum perkawinan di

Indonesia, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan. Data Sekunder dalam penelitian ini juga terhimpun dari artikel-artikel dengan arsip-arsip yang erat kaitannya dengan obyek yang sedang diteliti.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap *survey*, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi dari responden secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang diantaranya adalah para pihak yang sedang atau telah melakukan prosesi akad nikah dan juga pendapat para tokoh agama di daerah setempat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai tatacara dan makna yang ada dibalik kegiatan tersebut.

##### **b. Dokumentasi**

Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Sedangkan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari Kecamatan Masalle dan juga Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

### E. *Metode Analisis Data*

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing variable. Maksudnya adalah di dalam skripsi ini, peneliti akan menganalisis pandangan masyarakat setempat seputar *Adat Massombo* dan karakteristik masyarakat setempat.

### F. *Metode Pengelolaan dan Analisis Data*

#### a. *Editing*

Metode ini dilakukan untuk mengecek kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian daftar pertanyaan dan ketidak serasian informasi. Tujuan metode ini adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dilapangan saat dilakukan proses pengumpulan data. Data yang diperoleh oleh peneliti agar lebih memudahkan untuk diklasifikasi, maka peneliti terlebih dahulu meng-edit data-data yang telah terkumpul. Karena bisa jadi data yang diperoleh terdapat banyak kesalahan dalam penulisan atau maksud dari data yang tertuang tidak jelas maksudnya. Pada tahap ini peneliti akan memeriksa data-data yang telah dituangkan dalam tulisan dengan yang ada dalam rekaman *video recording*,



peneliti melengkapi kekurangan data yang telah tertuang dalam tulisan dengan metode ini.

b. *Classifying*

Metode ini menatur data sedemikian rupa sehingga dapat dapat dilakukan suatu analisa data. Jika data yang terkumpul telah diatur (*editing*) maka proses selanjutnya adalah memetakan atau memilah data dan memberikan pola tertentu untuk memperjelas atau mempermudah pembahasa.

c. *Verifying*

Metode ini dilakukan setelah mengklarifikasi data-data dan memetakan dalam beberapa pola, maka langka selanjutnya adalah pengecekan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh agar validasi data dapat terjamin. Data yang telah diperiksa ulang dan velidasinya telah terjamin akan mempermudah dalam tahap analisis.

d. *Analyzing*

Langkah selanjutnya adalah menganalisa data , yaitu data mentah yang telah diperoses melalui beberapa tahapan dan telah layak untuk dianalisa. Analisa data ini sebagai dasar penarikan kesimpulan.

e. *Concluding*

Metode ini dilakukan setelah menjalani semua poses di atas dan data-data yang telah tersusun secara sistematis, saatnya mencari konklusi dari data-data yang telah dianalisa. Untuk menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan penemuan karakteristik yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### 1. Kondisi Geografis

###### a. Letak dan Batas Kecamatan Masalle

Kecamatan Masalle merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Enrekang.

Adapun nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang:

1. Kecamatan Enrekang
2. Kecamatan Maiwa
3. Kecamatan Curio
4. Kecamatan Bungin
5. Kecamatan Baraka
6. Kecamatan Alla'
7. Kecamatan Anggeraja
8. Kecamatan Baroko
9. Kecamatan Cendana
10. Kecamatan Buntu Batu

##### **11. Kecamatan Masalle ( tempat peneliti melakukan penelitian )**

Sebagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Masalle mempunyai batas wilayah yaitu:

1. Sebelah Selatan : Kecamatan Anggeraja
2. Sebelah Timur : Tana Toraja
3. Sebelah Barat : Kecamatan Baroko

Adapun nama-nama Desa di Kecamatan Masalle:

1. Desa Mundan
2. Desa Batu Ke'de
3. Desa Tongkonan Basse
4. Desa Masalle
5. Desa Rampunan
6. Desa Buntu Sarong.

Data penduduk menurut Agama tahun 2016.

1. Desa Masalle (Laki-laki= 1.496 orang), (Pepempuan= 1.408 orang), (Islam= 2.904 orang) jadi jumlah keseluruhannya adalah 2.904 orang
2. Desa Buntu Sarong (laki-laki=1.151 orang), (perempuan=1.182 orang), (Islam= 2.333 orang) jadi jumlah keseluruhan adalah 2.333 orang
3. Desa Rampunan (laki-laki=995 orang), (perempuan=1.045 orang), (Islam= 2.040 orang) jadi jumlah keseluruhan adala 2.040 orang
4. Desa Tongkonan Basse (laki-laki=868 orang (perempuan= 871 orang), (Islam=1.739 orang) jadi jumlah keseluruhan adalah 1.739 orang
5. Desa Batu Kede (laki-laki=1.199 orang), (perempuan=1.504 orang), (Islam=2.703 orang) jadi jumlah keseluruhan adalah 2.703 orang
6. Desa Mundan (laki-laki=1.017 orang), (perempuan=921 orang), (Islam= 1.930 orang), (Protestan=8) jadi jumlah keseluran adalah 1.938 orang

Jadi jumlah penduduk Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang tahun 2016, laki-laki berjumlah 6.731 orang, perempuan berjumlah 6.931 orang, yang beragama islam berjumlah 13.640 orang dan yang beragama Protestan berjumlah 8 Orang jadi jumlah keseluruhan masyarakat Kecamatan Masalle 13.648 orang

Dari semua Desa yang ada di Kecamatan Masalle Peneliti memilih Tokoh Adat disetiap Desa yang akan dijadikan obyek penelitian karena ketika peneliti melakukan obsevasi kewarga masyarakat yang pernah melakukan tradisi *Massombo*’, hampir sebahagian besar masyarakat mengarahkan kepada Tokoh adat yang ada di Desa Masing-masing karena mereka beranggapan bahwa tokoh adatlah yang memahami betul tentang Tradisi *Masommbo*’ tersebut.

Dari segi kuantitasnya, hampir semua penduduk Masalle memeluk agama Islam dan sebagian lagi ada yang beragama Protestan yang berada di daerah Utara Kabupaten Enrekang yang berbatasan dengan Tanah Toraja, dari data rekapitulasi hasil pendataan warga atau dinas penduduk tingkat Kecamatan tahun 2016 menunjukkan bahwa kebanyakan dari penduduk Masalle tergolong Masyarakat menengah bawah, umumnya mata pencaharian mereka adalah tani, perantau, pedagang dan tukang kayu atau meubel.

Dari segi pendidikan , banyak dari mereka yang pernah mengenyam bangku sekolah, akan tetapi kebanyakan dari mereka hanya dapat menyelesaikan sampai SLTA, dan hanya sedikit yang dapat melanjutkan kenjenjang yang tidak tamat sekolah dasar (SD). Jadi kalau dilihat dari pendidikan warga Kecamatan Masalle tergolong masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan.

#### B. Kondisi Sosial Keagamaan

Pada konteks keagamaan, masyarakat Masalle mayoritas adalah Agama Islam dan adapula sebagian kecil yang beragama Protestan yang berdomisili daerah perbatasan dengan Tanah Toraja. Karena lokasi perbatasan inilah sehingga masyarakat yang ada di Kecamatan Masalle juga ada yang memegang teguh tradisi seperti yang ada di Tanah Toraja seperti acara kematian (*Rambu Solo*) dan Tradisi tahunan seperti *manggantak* atau tradisi pengobatan. Dan juga dari segi bahasa daerah yang ada di Kecamatan Masalle hampir sama dengan bahasa daerah yang ada di Tana Toraja karena letak geografisnya sangat dekat.

Sebagaimana kita ketahui sekarang bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Enrekang beragama Islam bahkan tidak asing lagi diteliga kita bahwa daerah Enrekang sangat terkenal dengan organisasi Muhammadiyah yang mengarah kepada ketaatan akan ajaran Allah Rasul-Nya. Tapi walaupun dengan demikian suasana keagamaan kurang begitu mewarnai kehidupan mereka. Misalnya saja dikecamatan Masalle ini walaupun semua penduduknya mayoritas beragama Islam dan sering kita jumpai pada tokoh-tokoh agama yang sangat paham Tentang Islam tapi tetap saja aturan Adat lebih diperhatikan dan diindahkan oleh sebahagian besar masyarakatnya daripada aturan atau ajaran Islam. Walaupun sekarang tradisi-tradisi menyimpang dengan Islam sudah mulai diminimkan contoh tradisi pengobatan (*Maggantak*) karena tradisi ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham masalah Agama yang dijadikan tukang sembelih binatang dalam prosesi acara adat tersebut.

Disamping beberapa tradisi yang ada didaerah tersebut peneliti memilih salah satu Tradisi yaitu *Massombo* sebagai symbol perkawinan yang masih

dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di daerah tersebut karena lebih mengarah kepada keilmuan peneliti.

Namun dalam rukun nikah itu terbagi atas lima yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan Qabul<sup>24</sup> sementara makna pernikahan dalam konteks hukum adalah rukun pernikahan terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>25</sup>

#### **B. Proses adat sebelum prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.**

Adat sebelum prosesi akad nikah dilakukan pas hariha lamaran, adat ini dinamakan oleh masyarakat Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang *Kawin To Jolo* (perkawinan yang dilakukan orang dulu sebelum melakukan perkawinan yang sebenarnya)

Mengenai Tata Cara Adat *Kawin To Jolo* tersebut sangatlah sederhana dan tergolong sangat unik karena keluarga calon pengantin pria dan wanita berkumpul di rumah calon pengantin wanita untuk melaksanakan adat *Kawin To jolo* . Adapaun yang di siapkan untuk melaksanakan tradisi ini calon pengantin pria dan wanita masing-masing mempersiapkan dua ekor ayam.

Setelah bahan-bahan disiapkan dan telah di setujui waktu akan di laksanakan lamaran sekaligus dilakukan adat *Kawin To Jolo* ini.

---

<sup>24</sup>Prof. Dr. H.M.A. Tihami,M.A.,M.M. Fikih Munakahat ( Jakarta :PT.Rajawali Pers, 2014), h. 12

<sup>25</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 18

Adat ini dipandu oleh imam Kampung dan Tokoh adat untuk hadir mengatur bahan-bahan yang sudah di siapkan. Ayam yang sudah di siapkan oleh masing-masing calon mempelai akan di sembeli oleh Tokoh Adat.

Yang paling unik di adat ini karena bukan piring yang digunakan melainkan daun pisang yang di bentuk berjumlah delapan, Empat disediakan untuk calon pengantin pria dan empat untuk calon pengantin wanita.

Setelah semuanya sudah siap dan daun pisang yang di bentuk pun sudah selesai bahan-bahan itu di satukan di delapan tempat yang telah di sediakan setelah semuanya sudah siap. Maka semua keluarga kedua calon pengantin, Tokoh Adat dan Tokoh Agama membentuk lingkaran.

Keluarga calon pengantin dan wanita membacakan doa agar kedoa calon pengantin bahagia dan bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma dan di berikan anak yang sholeh dan sholeha.

Gunanya adat ini sangatlah penting bagi masyarakat Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang karena Menurut Tokoh Adat Kecamatan Masalle Kawin *To Jolo* Ini sangat diperlukan pada saat ada keluarga yang tidak setuju akan pernikahan kedua calon pengantin. Tujuan mempertemukan keluarga agar keluarga yang mempunyai masalah bisa diselesaikan di prosesi adat ini.

Serta Adat kawin *To Jolo* ini juga bertujuan membicarakan tentang denda bagi calon pengantin pria dan wanita apabila saling meninggalkan suatu hari nanti tanpa ada alasan yang jelas.

Denda ini di dikeluarkan oleh calon pengantin pria dan yang melanggar perjajian yang telah di sepakati akan membayar denda baik pria maupun wanita.

Apabila pria yang melanggar harus membayar ke pria begitupun sebaliknya apabila wanita yang melanggar harus membayar denda ke pria. denda bisa di bayar menggunakan uang. Denda yang dimaksud disini adalah tanah, mahluk hidup seperti sapid an kerbau

Setelah adat ini selesai dilakukan kedua calon pengantin belum dikatakan resmi menjadi suami istri. Tetapi adat ini dilakukan terlebih dahulu baru melakukan prosesi akad nikah seperti yang telah di tentukan.

Adapun tujuan Kawin *To Jolo*

1. Menjaga bahasa satu sama lain biar tidak kasar setelah menjadi suami istri
2. Supaya orang-orang dulu dari laki-laki maupun perempuan mengetahui bahwa cucu cucu mereka ingin manbagun keluarga yang baru
3. Berdoa kepada Allah supaya di beri keselamatan
4. Saling memperkenalkan satu dengan lain dari keluarga laki-laki maupun perempuan.

Tujuan ini lah sehingga masyarakat Kecamatan Masalle masi mempertahankan adat ini.

### ***C. Proses adat sementara prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten***

#### ***Enrekang***

1. *Rengge kalepe*

Adat ini dilakukan oleh kerabat pengantin pria setelah hari pernikahan adat ini lakukan agar masyarakat yang mengahidiri acara pernikahan mengetahui bahwa kedua pengantin masi memiliki hubungan keluarga.



Orang yang membawah *Rengge Kalepe* ini di haruskan orang yang mempunyai anak yang banyak (*mabati-bati*) dan belum ada anaknya yang meninggal.

Adapaun isi bawaan yaitu songkolo dan Dangke masing-masing di bagi menjadi delapan bagian. Maksud dari delapan bagian itu bertujuan untuk empat bagian laki-laki dan empat bagian perempuan. Setelah sampai di rumah wanita Songkolo dan dangke yang sudah di bagi menjadi delapan di bagikan kepada kerabat yang paling dekat dengan kedua pengantin pria dan wanita.

## 2. *Buang rido* (menabur beras)

Sementara itu setelah penganti pria sudah sampai di rumah wanita ada kerabat pengantin wanita bersiap-siap untuk menabur beras ke pengantin pria maupun rombongannya. beras ditabur tiga kali sambil berkata delapan tidak habis-habis atau masyarakat kecamatan Masalle mengatakan *karua tang diangge-anggei*

ada pun maksud dari beras yang di buang tiga kali yaitu:

- a. Berdoa kepada Allah agar di beri kesehatan
- b. Berdoa kepada allah agar di beri ketabahan mencari nafkah
- c. Berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang shaleh dan sholeha

## 3. Adat tentang perwalian pernikahan (*Massorong Wai*)

Adat sementara Prosesi akad nikah ini terjadi pada perwalian pernikahan atau orang Enrekang Biasa menyebutnya sebagai *Massorong Wai* adat tersebut sangatlah sederhana dan tergolong sangat unik karena bukan dengan surat kuasa melainkan menggunakan simbol secangkir Air Putih jernih yang belum di masak.

*Massorong* berarti menyerahkan sedangkan *Wai* atau *wailino* adalah air jernih. Ketikah orang tua calon mempelai perempuan menyerahkan segelas air putih tersebut dengan orang lain, dan orang yang diberi air tersebut menerima maka proses perwalian tersebut sudah terlaksana tapi ketika yang disugukan air tersebut menolak berarti orang tua calon mempelai wanita tersebut cari orang lain yang hadir saat itu tapi terkadang ketika seseorang menolak pemberian air tersebut untuk menikahkan anaknya kemudian dia pulalah yang menunjuk orang lain yang mungkin lebih terpendang ketimbang dirinya apakah kepada Tokoh Agama atau Tokoh Adat bahkan penghulu yang hadir pada saat prosesi akad sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang lebih tua dan lebih berpendidikan.

Namun di kalangan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat proses yang sederhana tidak begitu penting tetapi maknalah yang lebih utama. Biasanya proses pemberian hak untuk mewakili terkadang harus ada hitam diatas putih atau memiliki dasar hukum yang kuat. Namun tradisi *Massorong Wai* tidaklah mewakili metode seperti itu, melainkan hanyalah segelas air putih yang kemudian diserahkan oleh orang tua calon mempelai wanita kepada yang akan menjadi wali nikah dalam prosesi pernikahan itu.

Dan ketika sudah menerima sodoran air tersebut maka orang tua calon mempelai wanita tersebut kemudian memegang wadah dari pada tempat air putih tersebut yang telah disiapkan sebelumnya, seraya berniat dalam hati agar kelak pernikahan anaknya akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika selesai berniat maka orang tua calon mempelai wanita tersebut berkata mudah-mudahan pernikahan anakku akan tetap bertahan seumur hidupnya kepada orang yang

memang dipilih menggantikan posisinya sebagai wali dalam menikahkan anaknya. Dan ketika orang yang menerima air tersebut juga berniat dalam hati lalu mengucapkan saya terimah amanah yang kau percayakan kepada saya, dan alangkah bijaknya ketika kita sebagai manusia mampu menjalankan sebuah amanah yang dipercayakan kepada kita.

Dan tanda berakhirnya *Massorong Wai* tersebut ketika orang yang menerima amanah tersebut kemudian berkumur-kumur dengan air yang telah diserahkan. Maka selesailah proses *Massorong Wai* tersebut yang sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa ketika itu dilakukan maka makna dari pada rangkaian sederhana tersebut amatlah besar.

Tokoh Adat Desa Mundan Memaparkan tentang makna dari tradisi *Massorong Wai*

“ Ada empat unsur dalam diri kita sebenarnya, yang pertama adalah angina makanya ada napas, Api adalah amarah dan perasaan, tanah yang melambangkan wujud jasmani dan air adalah darah. Dan kenapa harus air yang menjadi objek ketika proses perwalian karena air melambangkan banyak hal dalam kehidupan, contoh kecil bahwa proses awal manusia (bukan manusia pertama) berawal dari sperma yang berbentuk cair dan air juga adalah sumber kehidupan jadi yang paling tepat digunakan dari empat unsur dalam diri manusia adalah air dan *Massorong* (menyerahkan) adala simbol kerelaan orang tua calon pengantin perempuan kepada siapa yang kemudian dipercaya untuk menikahkan anaknya”.

**D. Proses adat *Massombo'* sesudah prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.**

*Massombo'* (menyusul)<sup>26</sup> ini dilakukan setelah prosesi akad nikah di kecamatan Masalle ini merupakan kegiatan kunjungan balasan pihak keluarga pengantin wanita ke rumah pengantin pria.

Pengantin pria dan wanita harus (*Pamali*) tinggal dirumah wanita selama tiga hari. Dan tidak boleh langsung kerumah pengantin pria. Walaupun pengantin pria melakukan acara. Acara pengantin pria itu dilakukan setelah hariha *Massombo'*

Pada saat tiga hari selesai pernikahan akan dilakukanlah adat *Massombo'* dan pihak laki-laki datang menjemput pengantin wanita dengan membawa jenis kue yang manis.

Namun masyarakat menganggap bahwa kue yang dibawah harus bersifat manis agar kelurga kedepan tidak sering bertengkar atau banyak masalah dalam urusan keluarganya akan tetapi masyarakat Kecamatan Masalle juga beranggapan bahwa tradisi ini harus dilakukan agar pengantin pria dan wanita tidak sering sakit-sakitan.

**E. Pandangan hukum Islam terhadap adat *Massombo'* pada prosesi akad nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.**

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun Tumbuh-Tumbuhan. Ia adalah

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Sinau tgl 16 maret 2017.

suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah merupakan bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bias diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bias diartikan (*wath'u al zaujah*) bermaknah menyetubui istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga di kemungkakan oleg *Rahmat Hakim*, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia<sup>27</sup>

Adapun dasar hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*) dan sebagainya.<sup>28</sup> Dan apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pertyataan Allah dalam Al-quraan. Didalam Q.S. Al-Dzariyat/51:49.:

---

<sup>27</sup>Rahman Hakim, *Hukum perkawinan islam* (Bandung: Pustaka setia, 200), h. 11

<sup>28</sup>H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan agus salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, h. 1.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”<sup>29</sup>

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, *Imam Izzudin Abdussalam*, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Maslahat yang diajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya, Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi pada *fadhil* (paling utama) dan *mutawatssith* (tengah-tengah) maslahat yang paling utama adalah maslahat yang mengandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang sunnahnya oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebijakannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, *maslahat sunnah* yang ringan yang mendekati *maslahat* mubah
3. Maslhata mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. *Imam Izzudin* berkata:”Maslahat mubah bias dirasakan secara langsung.

---

<sup>29</sup> Al-Qura'an

Sebagian antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.”<sup>30</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan Maslahat taklif perintah (*thalabal fi'il*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*tahalabal kaff*). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemasfsadatan dan mencegah kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkannya perkara haram tentu lebih besar disbanding kerusakan pada perkarah makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.<sup>31</sup> Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubag menurut *Ahkamal-khamzah* (hukum yang limah) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah wahib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyalamatkannya dari perbiatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban

---

<sup>30</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih*, terjemahan saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 558-559.

<sup>31</sup>Muhammad Abu Zahra, h. 559

lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencari istri.

3. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup menegndalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal sepert ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
4. Nikah mubah, yaitu bgi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bilah tidak nikah.<sup>32</sup>

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bias menjadi wajib, haram, sunnahm dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

#### Rukun dan syarat sah pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ikhram* untuk shalat.<sup>33</sup> atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

*Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantil laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

“Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”

---

<sup>32</sup> H.S.A. Al-Hamdani, h. 8

<sup>33</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, ( Jakarta: prenada Media, 2003), h. 45



Pernikahan didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memelurkan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab Kabul.<sup>34</sup>

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

1. Syarat suami
  - a. Bukan mahram dari calon istri
  - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
  - c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnya
  - d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat istri
  - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak dalam *iddah*.
  - b. Merdeka, atas kemauan sendiri

---

<sup>34</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqi Munakahat* (bandung: Pustaka Setia, 1999), h.

- c. Jelas orangnya; dan
- d. Tidak sedang berihram

3. Syarat-syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak terpaksa
- e. Adil; dan
- f. Tidak sedang ihram

4. Syarat-syarat saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas tidak terpaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram
- h. Memenuhi bahasa yang dipergunakan untuk *ijab Kabul*.

Syarat-syarat *shigat*: *shigat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. *Shiqat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan

waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: "Kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak". Kemudian dijawab: "saya kawinkan dia (anak perempuan) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan.

*Shigat* itu hendaknya terikat dengan batasan-batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya dengan ucapan: "saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya". Kemudian pihak laki-laki menjawab: "ya saya terima". Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

Adapun tujuan dan hikmah perkawinan menurut hukum islam

#### 1. Tujuan perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawah Rasulullah saw., yaitu penetapan hal ihwal manusi dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. *Rab' al-ibadat*, yang menata hubungan manusi selaku makhluk dengan khaliknya
- b. *Rab al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rab' al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan
- d. *Rab' al-jinayat*, yang menata pengamannya dalam sesuatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>35</sup>

*Zakiyah Darajat*. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajar manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- e. Membangun rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Ali Yafie, pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana, (Jakarta: lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdathul ulama dan BKKBN, 1982) , h.1.

<sup>36</sup>Zakiya Drajat, Ilmu fiqih ( Jakarta: Depag RI, 1985 ) jilid 3, h. 64

Perkawinan jika bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksanaan pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>37</sup>

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد على الفطرة فإبواه إن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري)

Artinya

“ Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir diatas fitrah maka ayah dan ibundanya yang menjadikannya yahudi, Nasrani atau Majusi,” ( H. R.Bukhari dari Abu Hurairah)<sup>38</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah:

- a. Kesukarelaan
- b. Persetujuan kedua belah pihak
- c. Kebebsan memilih
- d. Darurat

Perkawinan adalah makniah dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

<sup>37</sup>HAS. Al-Hamdani. H. 133

<sup>38</sup>Muhammad Faud Abdul baqi, Al-lu'lu'u Wa Al-Marjan, Alih Bahasa Salim Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu,1996), H. 101

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.

Firman Allah Swt. Di dalam Q.S. Al-Baqarah.2 : 187

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .....

Terjemahnya

“.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka .....”

- b. *Understanding* dan toleransi yang lurus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya<sup>39</sup>

Sulaiman Al-mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya
- b. Untuk *Iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; *Ihsan* (membentengi diri) dan *Mubadho'ah* (bias melakukan hubungan intim)

---

<sup>39</sup>Hj. Huzainah Tahilo yanggo, *Masail Fiqhiyah, kajian hukum islam kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005) h. 134

- c. Memperbanyak ummat Nabi Muhammad saw.
- d. Menyempurnakan agama
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surge
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuh moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
- j. Saling mengenal dan menyayangi
- k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang
- m. Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bias saling mengenal dan sekaligus menagsihi.
- n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan

- o. Untuk mengikuti panggilan *Iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.<sup>40</sup>

#### Hikmah perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah kerana akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, adapun hikmah pernikahannya adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadih segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasann tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestariakan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak

---

<sup>40</sup> Sulaiman Al-mufarraj. H. 51



bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengespoitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menandai tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, dipotong, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan musyawarah yang kuat lagi bahagia<sup>41</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di nmuka bahwa masyarakat Kecamatan masalle Kabupaten Enrekang mempunyai budaya yang begitu banyak, akan tetapi disamping mereka tetap membudayakan adat istiadatnya, merkea tetap meyakini Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan keyakinan mereka dalam beribadah kepada-Nya. Hal ini menandakan bahwa Agama Islam dilaksanakan secara utuh di dalam segala tingkah lakunya, baik yang berhubungan dengan sesame makhluk maupun yang berhubungan dengan penciptanya.

Agama merupaka hamba dengan tuhanNya, dan hubungan tersebut mengandung kewajiban-kewajiban yang bersifat keagamaan seperti, cinta, percaya kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya.

---

<sup>41</sup>Sulaiman Al-Mufarraj. H.21

Namun sebagai masyarakat yang mempunyai adat dan budaya, maka dalam setiap tingkah laku kehidupannya tidak bisa terlepas dengan nilai-nilai leluhur budaya bangsa, selama nilai-nilai budaya sedikit bertentangan dari pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu didalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Nilai-nilai adat sangat di utamakan tetapi bukan berarti melupakan sepenuhnya nilai-nilai ajaran Islam, walaupun ada beberapa kegiatan dalam proses perkawinan yang sedikit bertentangan dengan hukum Islam hanya saja kekekiran. Ini terbukti bahwa masyarakat di daerah melaksanakan rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam.

Dalam hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. H. Hilman Hadikusuma, mengatakan sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung kepada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.<sup>42</sup>

Dengan demikian kedua system hukum itu saling mempengaruhi antara satu sama lainnya dan mempunyai makna yang cukup mendalam. Artinya hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya.

---

<sup>42</sup>Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Cet III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007) h. 27.

Mahadi mengatakan, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil satu keputusan. Namun yang dipergunakan itu tentulah bukan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam tetapi terbatas pada hukum adat yang serasi dengan asas-asas hukum Islam.<sup>43</sup>

Dari keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan adat perkawinan masyarakat Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, namun ada beberapa yang mungkin ada kekeliruan sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Artinya jika perkawinan itu sudah sah menurut hukum Islam, maka sudah sah pula menurut hukum adat.

#### Pengertian Tahayul

Kata *tahayul* berasal dari bahasa Arab yang artinya: berangan-angan tinggi, melamun, membayangkan atau menghayal (Kamus Munawwir). Mengkait-kaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu, yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Sebagai contoh tahayul adalah : mempercayai akan mendapatkan rejeki ketika orang tertimpa kotoran cicak. Atau suara burung yang dianggap aka nada tamu yang dating, dan lain sebagainya

Adapun perihal tathayyur, Muawiyah bin Al-Hakam Radhiyallu ‘anhu berkata, ‘Aku mengatakan:

ومنا ر جال يتطير ون، قال : ذاك شيء يجد و نه في صد و ر هم، فلا يصد نهم

Artinya:

---

<sup>43</sup>Muhammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1990) h. 206

Di antara kami ada orang yang tathayyur (percaya pamali). beliau bersabda “perasaan yang muncul di hati kalian, jangan jadikan penghalang kalian (jangan dihiraukan)” ( HR. Muslim, An Nasai, Abu Daud, dan Ahmad)

Adapun akibat dari tathayyur.

1. Seseorang akan merasa was-was, resah gelisah. Dia urung melakukan rencana karena sebuah alasan yang tidak dibenarkan dalam islam
2. Bila dipercaya bahwa alasan itu adalah penyebab akan datangnya kesialan, berarti dia telah terjerumus dalam sirik asghar. Misalnya: seseorang percaya bahwa terbangnya burung ke arah kiri adalah penyebab sial dalam safarnya nanti.
3. Bila dipercaya bahwa alasan itulah yang punya kuasa untuk mendatangkan kesialan, berarti dia telah jatuh dalam sirik akbar. Misalnya percaya bahwa burung itulah yang mampu mendatangkan kesialan.

Dari beberapa sumber referensi dan hasil wawancara terhadap masyarakat maka penulis menganalisa dan mengkaji apakah paham yang muncul dalam masyarakat setempat masih tetap dalam koridor yang diajukan ataukah lari dari hukum Islam, mereka sama sekali tidak menghilangkan atau menghalagi beberapa syarat dalam pernikahan terkhusus pada adat perkawinan, akan tetapi masyarakat Kecamatan Masalle menganggap bahwa adat *Massombo* ini sangatlah penting karena apabila adat ini tidak dilakukan akan membuat pengantin pria dan wanita akan sakit-sakitan. Setelah peneliti mengkaji lebih dalam tentang adat sesudah prosesi akad nikah (*Massombo*) ternyata telah melenceng dari Syariat Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini , maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam Konsep perkawinan menurut Islam, Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah yang shahih (sesuai dengan pemahaman para salafus shalih) yaitu Khitbah atau meminang, aqad Nikah, dan Walimah.
2. Pelaksanaan Adat istiadat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, Masyarakat Masalle pada Umumnya Masyarakat yang menganut satu agama yakni agama Islam. Pada umumnya masyarakat ini cinta akan tradisi perkawinan namun, bukan berarti adat perkawinan yang dilakukan tidak sesuai syarat-syarat atau rukun perkawinan akan tetapi ada saja tradisi yang dilakukan bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat kecamatan Masalle melaksanakan perkawinan melalui beberapa tahap, dari tahap awal sampai tahap akhir yang merupakan proses yang harus dilalui. Untuk melihat lebih jauh tentang pelaksanaan adat perkawinan masyarakat kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.
3. Adat perkawinan Masyarakat kecamatan Masalle sesudah perkawinan (*Massombo'*), sebagaimana telah dijelaskan bahwa acara ini dilakukan

setelah tiga hari setelah prosesi. Akan tetapi alasan masyarakat tetap mempertahankan adat ini karena bertujuan supaya kedua mempelai wanita dan pria tidak mengalami sakit-sakitan. Oleh karena itulah adat yang dilakukan Masyarakat kecamatan Masalle tersebut telah melenceng dari Syari'at Islam, karena meminta perlindungan selain dari Allah swt.

### ***B. Implikasi penelitian***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan masukan berupa saran kepada seluruh masyarakat terkhusus yang berada di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dan Masyarakat diluar daera tersebut yang mungkin melakukan tradisi yang sama dalam hal perkawinan adalah:

1. Melakukan pendekatan persuasif, yaitu melakukan pendekatan secara door to door dengan perlahan kepada masyarakat setempat terutama kepala adat dan petinggi adat
2. Melakukan pendekatan kepada golongan muda maupun anak-anak untuk menjelaskan makna adat *Massombo* ' agar tidak salah memahami.
3. memberikan pemahaman kepada masyarakat di kecamatan Masalle melalui penyuluhan .

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abdurrahman. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.

Ahmad, Abd Kadir. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis Publishing, 2006.

B, Setiwan. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipa Adi Pustaka, 1991.

Darajat, Zakiyah. *Ilmi fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 1958

Darmansyah, M dkk. *Ilmu Social Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Djojodigono. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Gama, 1958.

Daud, Muhammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Gautama, Sudargo. *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung: Gama, 1973.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandur Maju, 2007.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Cet. Ke-3, Edisi ke-2

Mary, Welstead, dkk. *Family Law* New York: Oxford University Press, 2006.

Mun 'im, Adil Abdul dkk. *Ketika Nikah Jadi Pilihan*. Jakatra: Almahira, 2001.

Nonci. *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*. Makassar: Aksara, 2002.

Nurnaga, andi. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. Makassar: Karya Mandiri Jaya, 2001.

Prawirohamidjojo, Soetojo dkk. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 2000.

Pabittei, Aminah. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Makassar: Dinas Kebudayaan dan Keperiwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2001.

-----Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN 1974 Nomor 1, TLN 3019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

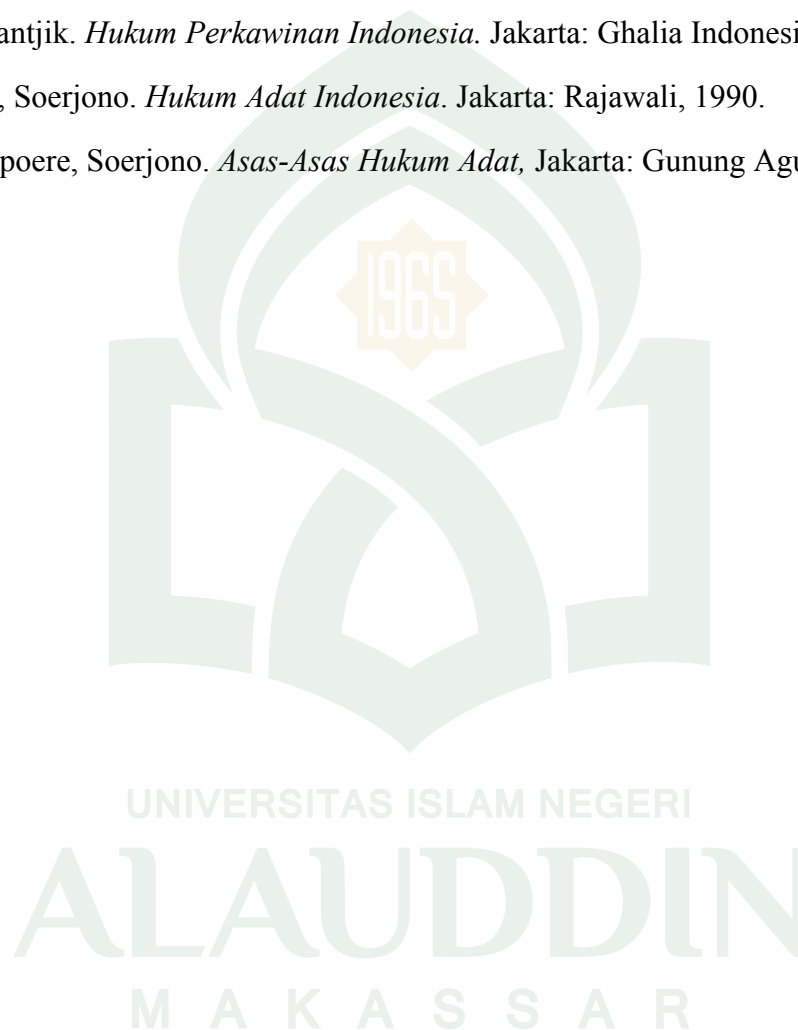
Syahri. *Implementasi Agama Islam pada Masyarakat Jawa*. Jakarta: Depag, 1985.

Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Wignjodipore, Soerjono. *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1988.





L

A

M

P

I

R

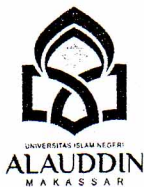
A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**


Kampus I: Jln. Sultan Alauddin No. 63 Makassar, Tlp. (0411) 868720, Fax. 864923  
Kampus II: Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, Tlp. (0411) 841879, Fax. 8221400

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**NOMOR : 344 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
  - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai dosen pembimbing Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama R.I. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  4. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  5. Keputusan Rektor Nomor 129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- a. Menunjuk Saudara : 1. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag.  
2. Dr. Supardin, M.HI.  
sebagai pembimbing mahasiswa:  
Nama : Irmayanti  
NIM : 10100113010  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Peradilan/HAPK  
Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MASSOMBO' SETELAH PROSESI AKAD NIKAH DI KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG
  - b. Melaksanakan pembimbingan skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
  - c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
  - d. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 21 April 2016  
Dekan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
  
Prof. Dr. Darussalam, M. Ag.  
NIP. 196210161990031003

**Tembusan:**  
Rektor UIN Alauddin Makassar di Makassar (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

Kampus I: Jln. Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telp. (0411) 868720, Fax 864923  
Kampus II: Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa Telp. (0411) 841879, Fax 8221400

Nomor : FSH/PA-HAPK/ 050 /2016  
Lamp. : 1 (satu) Proposal  
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

Samata, 01 Juni 2016

Saudari Irmayanti

Kepada Yang Terhormat

1. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. ( Pembimbing I )
2. Dr. Supardin, M.Hi. ( Pembimbing II )

Di

Makassar

*Assalamu Alaikum Wr, Wb*

Sehubungan dengan pelaksanaan seminar proposal, maka kami mengundang untuk menghadiri dan melaksanakan serta bertindak sebagai pembimbing pada seminar draft skripsi tersebut, insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 03 Juni 2016  
Waktu : Jam 15.00 WITA  
Tempat : Ruang Jurusan Peradilan Agama  
Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MASSOMBO'  
PADA PROSESI AKAD NIKAH DI KECAMATAN MASALLE  
KABUPATEN ENREKANG.

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*

A.n. Dekan,

Ketua Jurusan Peradilan



Dr. Supardin, M.Hi.

NIP. 19650302 199403 1 003

Tembusan Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Alauddin Makassar


## PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

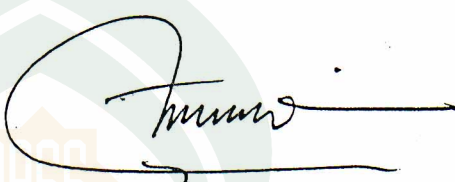
Draft skripsi yang berjudul, *Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Massomho* pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, yang disusun oleh Irmayanti, NIM:10100113010, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diseminarkan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 M, bertepatan dengan 26 Sya'ban 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian.

Samata, 27 Mei 2016 M  
26 Sya'ban 1437 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 19621016199031003

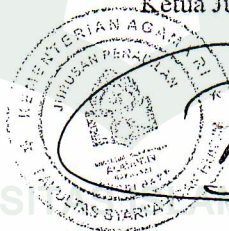
  
Dr. Supardin, M.HI.  
NIP. 196503021994031003

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Peradilan



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 19621016199031003



Dr. Supardin, M.HI.  
NIP. 196503021994031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Irmayanti, NIM: 10100113010, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang berjudul: "Pandangan Hukum Islam terhadap Adat *Masombo*' Pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil).


Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Makassar, 21 Maret 2017 M  
24 Jumadil Akhir 1938 H

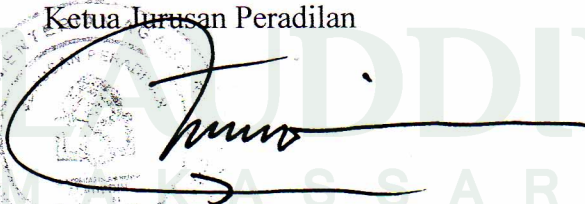
Pembimbing I

  
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

Pembimbing II

  
Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 19650302 1994031003

Disetujui oleh:  
Ketua Jurusan Peradilan

  
Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 19650302 1994031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II: Jl. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Telp. (0411) 841879 Fax 8221400

Nomor : SI.1/PP.00.9/1629/2016  
Lamp : -  
Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Makassar, 21 Juni 2016

Kepada:  
Yth Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel  
Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini:

Nama : Irmayanti  
Nim : 10100113010  
Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum/ Jurusan Peradilan  
Semester : VI (Enam)  
Alamat : BTP blok L No. 200

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya adalah:

**"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MASSOMBO' PADA PROSESI AKAD NIKAH DI KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG**

Dengan Dosen Pembimbing: 1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
2. Dr. Supardin, M.Hi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya, mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, terhitung mulai tanggal 11 Juli - 6 Agustus 2016.

Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

dan Rektor,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa



12016191428814

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
( UPT - P2T )

Nomor : 8575/S.01.P/P2T/06/2016  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Enrekang

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/1629/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **IRMAYANTI**  
Nomor Pokok : **10100113010**  
Program Studi : **Peradilan**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**  
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MASSOMBO" PADA PROSES AKAD NIKAH DI KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Juli s/d 06 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 22 Juni 2016

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A. M. YAMIN, SE. MS.**  
Pangkat : **Pembina Utama Madya**  
Nip : **19610513 199002 1 002**

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
2. Peninggal

SIMPAP BKPMMD 22-06-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://p2t.bkpmmd.sulselprov.go.id> Email : [p2t\\_provsulsel@yahoo.com](mailto:p2t_provsulsel@yahoo.com)  
Makassar 90222







**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0421)-21079*  
**ENREKANG**

Enrekang, 28 Juni 2016

Nomor : 562/KPMPTSP/IP/VI/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Camat Masalle  
Di-  
Kec. Masalle

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Nomor: 8575/S.01.P/P2T/06/2016, tanggal 22 Juni 2016, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Irmayanti**  
Tempat Tanggal Lahir : Pakewa, 13 Juni 1994  
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Pakewa Desa Rampunan Kec. Masalle

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo Pada Proses Akad Nikah Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang"**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 28 Juni s/d 28 Juli 2016

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
Kepala KPM PTSP Kab. Enrekang  
**MUMRAWAN N, SKM, M.Kes**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 19611212 198603 1 020

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang ( Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala kesbang Linmas Pol PP. Kab. Enrekang.
04. Kabag. Kemasyarakatan Setda Kab. Enrekang
05. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
07. Yang Bersangkutan (**Irmayanti**).
08. Pertinggal.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana adat sebelum prosesi perkawinan di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana adat sementara Prosesi perkawinan di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana adat sesudah Prosesi perkawinan di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang ?
4. Apakah adat perkawinan ini masi sangat kental di lakukan oleh masyarakat setempat?
5. Bagaimana masyarakat menyikapi tentang adat perkawinan ?

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhajir  
Alamat : Rante bonggo Kecamatan Masalle  
Umur : 52 Tahun  
Jabatan : Toko Adat

Menerangkan Bahwa:

Nama : Irmayanti  
Nim : 10100113010  
Perguruan Tinggi : Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam terhadap Adat *Massombo* ' Pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Masalle, 02 Januari 2017

ALAUDDIN  
M A K A S S A R  
Muhajir



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
**KECAMATAN MASALLE**

*Alamat : Jalan Poros Buntu Jangla Jelp.....Kodepos 91754*

---

KETERANGAN PENELITIAN

Dengan ini menyatakan:

Nama : IRMAYANTI  
Nim : 10100113010  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Peradilan Agama  
Alamat : Desa Rampunan Kecamatan Masalle

Bahwa benar melakukan penelitian di Enam (6) Desa pada kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, Dalam Rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MASSOMBO' PADA PROSESI AKAD NIKAH DI KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG” yang dilaksanakan sejak tanggal 01 Juli dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Camat Masalle

Sekretaris



**A M R I, S.Pd**

NIP : 19700717 199803 1 011

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923*  
*Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

Nomor : 1469/SI.1/PP.00.9/3../2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 29 Maret 2017

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua )
  2. Dr. Hj. Patimah, M.Ag (Sekertaris)
  3. Dr. Hj. Patimah, M.Ag Penguji I )
  4. Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag . ( Penguji II )
  5. Prof. Dr. Darussalam S. M.Ag. (Pembimbing I)
  6. Dr. H. Supardin, M.Hi . (Pembimbing II)
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Irmayanti  
N I M : 10100113010  
Jurusan : Peradilan Agama

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017  
Waktu : Pukul 13.00-14.00 Wita  
Tempat : Ruang Jurusan PA

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor ~~293~~ Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Irmayanti  
N I M : 10100113010  
Jurusan : Peradilan Agama  
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Massombo pada Prosesi Akad Nikah di Kec. Massale Kab. Enrekang"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dr. Hj. Patimah, M.Ag  
Penguji I : Dr. Hj. Patimah, M.Ag  
Penguji II : Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag  
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Samata  
29 Maret 2017  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

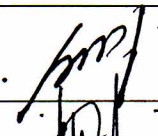


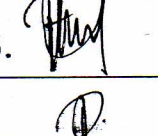
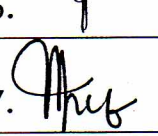
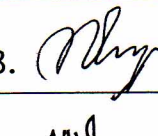
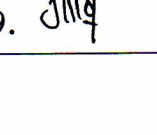

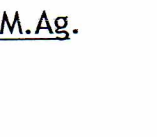
## DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Irmayanti

NIM : 10100113010

JURUSAN : Peradilan Agama

JUDUL SKRIPSI : “Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Massombo pada Prosesi  
Akad Nikah di Kec. Masalle Kab. Enrekang”

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1. 
2.	Dr. Hj. Patimah, M.Ag	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Darussalam S, M.Ag	Pembimbing	3. 
4.	Dr. H. Supardin, M.Hi	Pembimbing	4. 
5.	Dr. Hj. Patimah, M.Ag	Penguji	5. 
6.	Drs. H. M. Jamal Jamil, M.Ag	Penguji	6. 
7.	Mujahidah, SE	Pelaksana	7. 
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8. 
9.	Irmayanti	Mahasiswa	9. 



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP 19621016 199003 1 003

## PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Irmayanti

NIM : 10100113010

JURUSAN : Peradilan Agama

JUDUL SKRIPSI : "Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Massombo pada Prosesi  
Akad Nikah di Kec. Masalle Kab. Enrekang"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata	...../4 =	90

UNIVERSITAS ISLAM SAMATA, 30 Maret 2017

Penilai,

Drs. H. M. Jamal Jamil, M. Ag



## PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Irmayanti

NIM : 10100113010

JURUSAN : Peradilan Agama

JUDUL SKRIPSI : "Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Massombo pada Prosesi  
Akad Nikah di Kec. Masalle Kab. Enrekang"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata	...../4 =	3,75

UNIVERSITAS ISLAM SAMATA, Samata, 30 Maret 2017

Penilai,

H. Supardin



## PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Irmayanti

NIM : 10100113010

JURUSAN : Peradilan Agama

JUDUL SKRIPSI : "Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Massombo pada Prosesi  
Akad Nikah di Kec. Masalle Kab. Enrekang"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata	...../4 =	4

UNIVERSITAS ISLAM SAMATA, 30 Maret 2017

Penilai,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

DAFTAR NILAI  
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF  
SEMESTER ..... 8 ..... (.....) WISUDA PERIODE ..... APRIL .....  
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Nama : IRMATANTI

NIM : 10100113010

Jurusan : PERADILAN AGAMA

Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT INASSOMBO  
PADA PROSES AKAD NIKAH DI KECAMATAN MASALLE  
KABUPATEN ENREKANG

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
4	3,5	4	11,5	3,83

Samata, 29 Maret 2017

Kasubag.  
Akademik dan Kemahasiswaan  
  
HUDA H, S.E.  
NIP : 19670309 199303 2 002

## PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Irmayanti, NIM: 10100113010, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul, "Pandangan Hukum Islam terhadap Adat *Massombo*' pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Makassar, 30 Maret 2017 M  
1 Rajab 1438 H

Munaqisy I : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

(.....)

Munaqisy II : Drs. H. M. Jamal Jamil, M.Ag.

(.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. Darrusalam, M.Ag.

(.....)

Pembimbing II : Dr. H. Supardin, M.H.I.

(.....)

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darusalam, M.Ag.  
NIP: 196210161990031003

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan Peradilan

Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP: 196503021994031003





ALAUDDIN

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923*  
*Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**Nomor : 326 Tahun 2017**  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca** : Surat Permohonan :  
 Nama : Irmayanti  
 N I M : 10100113010  
 Jurusan : Peradilan Agama  
 Hari/Tanggal : Senin, 3 April 2017  
 Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
 Judul : "Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Massombo' pada Prosesi Akad Nikah di Kec. Masalle Kab. Enrekang"

**Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum  
 Penguji I : Dr. Hj. Patimah, M.Ag  
 Penguji II : Drs. H. M. Jamal Jamil, M.Ag  
 Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
 2. Nurhayati Wahid

Ujian Munaqasyah/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata  
 Pada tanggal : 30 Maret 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 NIDP: 19621016 199003 1 003

Tembusan  
 Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 15.06/SI.1/PP.00.9/03/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 30 Maret 2017

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
  2. Dr. Hamsir, M.Ag (Sekertaris)
  3. Dr. Hj. Patimah, M.Ag (Penguji I)
  4. Drs. H. M. Jamal Jamil, M.Ag (Penguji II)
  5. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag (Pembimbing I)
  6. Dr. H. Supardin, M.Hi (Pembimbing II)
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

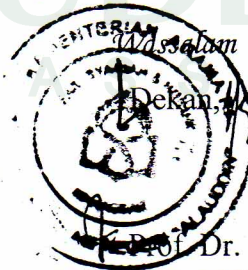
Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Irmayanti  
N I M : 10100113010  
Jurusan : Peradilan Agama

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 3 April 2017  
Buka Sidang : 08.30 WITA  
Waktu : Pukul 13.00 – 14.00 WITA  
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923*  
*Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 140 Tahun 2017

**TENTANG**

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi: **Peradilan Agama** tanggal 17 Maret 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SURAT KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 17 Maret 2017

Prof. Dr. Da'ussalam Syamsuddin, M.Ag 2  
NIP. 196210161990031003

Tembusan :  
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**NOMOR : 190 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KETUA/SEKANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH 03	MKDU/DIS 04	MKKP 05	
01	02				06
1	Dwiyanti 10100113009	Dr. Hj. Hartini Tahir, M.H.I.	Drs. H. M. Jamal Jamil, M.Ag.	Dr. H. Supardin, M.H.I.	Dr. Hamsir, M.Hum Mujahidah, SE Nurhayati Wahid
2	Irmayanti 10100113010	Andi Intan Cahyani, S.Ag, M.Ag	Zulfahmi Alwi, M.Pd. Ph.D.	Dr. Hj. Patimah, M.Ag	Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag Drs. Aminullah Hj. Helmi Sulaiman, S.H
3	Marwan Regif Nur 10100113135	Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag	Dr. Dudung Abdullah, M.Ag.	Dr. Hj. Patimah, M.Ag	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid
4	Rian Hidayat 10100113056	Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag	Drs. H. M. Jamal Jamil, M.Ag.	Dr. H. Supardin, M.H.I.	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid

16 Maret 2017



Darussalam Syamsuddin, M.Ag

19016 199003 1 003



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis skripsi yang berjudul, “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MASSOMBO” PADA PROSESI AKAD NIKAH DI KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG” bernama lengkap Irmayanti, NIM: 10100113010, lahir di Pakewa Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang pada tanggal 13 Juni 1994. Penulis merupakan anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda Jamma (Alamarhum) dan Ibunda Tianna.

Penulis mengawali jenjang pendidikan pertama pada tahun 2002 yakni Sekolah Dasar (SD) Negeri 197 Kaban Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang hingga selesai. Di tahun 2007 penulis melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 7 Alla. Tiga tahun kemudian menyelesaikan SLTP tepatnya pada tahun 2010. Di tahun yang sama pula, penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2013.

Kemudian di tahun yang sama penulis mendaftar di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur undangan di jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan (Peradilan Agama).

Selama menyandang status mahasiswa di Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, penulis pernah menjadi Pengurus HMJ Peradilan Agama Periode 2014-2015, pengurus HPMM Cab. Masalle Periode 2015-2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R